

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Studi Pengelolaan Sektor Wisata Alam dan Budaya Situ Lengkong Panjalu oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pengelolaan sektor wisata alam dan budaya situ lengkong Panjalu dalam pengelolaannya masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah yang memiliki fungsi tersendiri sebagai penyelenggara kebijakan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, pelindung dan pelayan di daerahnya termasuk penataan atau pengelolaan sektor wisata, salah satunya sektor wisata situ lengkong Panjalu yang meliputi beberapa permasalahan terkait pengelolaan infrastruktur jalan setapak sekeliling situ lengkong Panjalu yang sebagian sudah rusak, kebersihan situ lengkong Panjalu dan kebersihan jalan setapak sekeliling situ lengkong Panjalu, serta keamanan didalam maupun diluar lingkungan sektor wisata situ lengkong Panjalu, tentunya dengan beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan sektor wisata situ lengkong Panjalu, yang menjadikan pemerintah belum maksimal dalam mengelola sektor wisata dari beberapa tahun kebelakang sampai saat ini. Sehingga kebijakan yang ada dan telah diterapkan belum sepenuhnya menegaskan kinerja kerja pemerintah dalam mengelola sektor wisata, dan terkait keseharian masyarakat dalam menjaga lingkungan sektor wisata alam situ lengkong Panjalu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Konsep Kebijakan Pengelolaan Pariwisata, diantaranya, Konsep Kebijakan; (Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan Publik) teori Pengelolaan Pariwisata dan Pemerintah Daerah.

Metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan penetapan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Kemudian, uji validitas yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini, Bahwasanya pemerintah desa dan daerah (Dinas Pariwisata, dan UPTD Pariwisata) belum sepenuhnya mengelola sektor wisata yang sesuai dengan aspek implementasi kebijakan pariwisata yang dikemukakan oleh Liu. Sehingga ada beberapa kebijakan yang belum diterapkan secara tertulis utamanya dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan lingkungan sektor wisata yang belum sempurna. Akan tetapi dalam peran dan tanggung jawab pengelolaan sektor wisata kebijakan sudah di buat dari hasil MOU yang tercatat dalam Perbup No 12 Tahun 2020 yang melibatkan beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sektor wisata dan melibatkan masyarakat sehingga terbuatlah kebijakan untuk pengelolaan infrastruktur yang ada dalam Perpres No 87 Tahun 2021. Dengan beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam pengelolaan sektor wisata yang selalu tertunda.

**Kata Kunci: Pariwisata, Situ Lengkong Panjalu, Pemerintah, dan Kebijakan.**